

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir pembangunan nasional. Adanya pembangunan dapat menunjukkan perubahan kehidupan masyarakat mencapai tahapan yang lebih baik. Pendapat Sukmaraga (2011) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik dan continue dalam mewujudkan masyarakat yang modern, maju dan sejahtera dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan pembangunan, faktor penghambat pembangunan sangat penting untuk diperhatikan agar semua pihak dapat mengatasi hal tersebut. salah satu faktor yang menghambat pembangunan yaitu kemiskinan. Menurut Kuncoro (2009) bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit di atasi dalam pembangunan suatu negara terutama bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan memiliki konsep yang fleksibel sesuai dengan perkembangan peradaban manusia.

Makna kemiskinan itu juga merupakan keadaan dimana individu atau masyarakat dalam suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang dan pangan. Menurut Sastraadmadja (dalam Permana:2012) bahwa berdasarkan pola waktu, kemiskinan dibedakan menjadi 4, antara lain: Persistent Poverty, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun temurun. Cyclical Poverty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Seasonal Poverty, yaitu kemiskinan musiman yang sering dijumpai

pada kasus nelayan dan pertanian. Accident Poverty, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. PDRB yang tinggi akan menekan tingkat kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB pembangunan dapat dioptimalkan, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, PDRB yang rendah akan meningkatkan jumlah kemiskinan dalam masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat tidak optimal. Kemiskinan menurut karakteristiknya terbagi dua jenis, yaitu kemiskinan absolute & kemiskinan relatif, kemiskinan absolut merujuk pada penduduk yang pengeluaran rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan karena situasi ekonomi yang buruk secara umum, sehingga pendapatan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar (Damanik, dkk: 2020).

Kelompok ini dapat keluar dari status kemiskinan jika kondisi ekonomi membaik, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang lebih baik. Sementara kemiskinan relatif adalah kondisi dimana garis kemiskinan bergantung pada persepsi masyarakat tentang kelompok termiskin. Hal ini tidak digunakan untuk perbandingan antar daerah atau antar waktu, tetapi bisa digunakan untuk menetapkan sasaran program bantuan kepada penduduk miskin. Indikatornya mencakup informasi kuantitatif yang mencerminkan distribusi pendapatan dan persentase penduduk dengan tingkat kesejahteraan terbawah (margareta, dkk:2024).

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses untuk dapat meningkatkan potensi pilihan-pilihan bagi penduduk atau secara umum diartikan sebagai upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat dalam sebuah negara agar dapat berperan aktif dalam memilih masa depan sesuai dengan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan secara material maupun spiritual, Keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari adanya campur tangan pemerintah dalam menetapkan peraturan atau regulasi. Tercapainya tujuan pembangunan manusia yang dapat ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peranan pemerintah dalam pembangunan manusia adalah melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yang tercermin pada anggaran di bidang kesehatan yang fungsinya untuk meningkatkan angka harapan hidup maupun untuk menurunkan angka kematian. Sedangkan untuk anggaran dibidang pendidikan berfungsi untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan yang baik dan murah, dengan harapan angka melek huruf dapat meningkat.

Tabel 1.1
PDRB, IPM, tingkat Kemiskinan
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024

No	Tahun	PDRB (X ₁) (Miliar rupiah)	IPM (X ₂) (%)	Tingkat Kemiskinan(Y) (Ribu jiwa)
1	2020	454.607,40	70,01	1.081,59
2	2021	493.636,90	70,24	1.113,76
3	2022	590.079,40	70,90	1.044,69
4	2023	629.168,70	71,62	1.045,68
5	2024	663.961,70	72,30	984,24

Sumber : Bps.Sumsel.2025

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan tahun 2020-2024 mengalami peningkatan sedangkan

variabel PDRB dan IPM di provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024.

Tingkat kemiskinan tahun 2021 sebesar 1.113,76 dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu sebesar 1.081,59ribu jiwa dapat disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan naik pada tahun tersebut pada tahun 2021. Sedangkan IPM Tahun 2021 meningkat sebesar 70,24% dan di Tahun 2020 sebesar 70,01% dampak dari covid-19 yang terjadi pada tahun 2019, adanya dampak dari covid-19 membuat kontribusi dari sisi pengeluaran perkapita yang disesuaikan mungkin belum sepenuhnya pulih atau bahkan tergerus oleh dampak pandemi pada tahun-tahun sebelumnya, menyebabkan ketidakseimbangan antara peningkatan kualitas hidup dasar dan daya beli riil. inflasi yang tinggi dapat mengikis nilai riil pendapatan dan daya beli Masyarakat, membuat kelompok berpenghasilan tetap atau pendapatannya tidak meningkat sesuai inflasi merasa semakin miskin, dengan itu Tahun 2021 Tingkat Kemiskinan justru semakin meningkat walaupun IPM-nya membaik. Secara teoritis IPM dan Tingkat Kemiskinan memiliki hubungan terbalik yang signifikan Dimana IPM meningkat akan menurunkan Tingkat Kemiskinan. Hal ini karena kualitas sumber daya manusia yang direpresentasikan oleh IPM yang meningkat akan meningkatkan produktivitas kerja dan pendapatan, yang dapat menurunkan Tingkat kemiskinan.

(Sayirullah & Gandasari) menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari IPM. Rendahnya IPM akan berakibat pada produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan

pendapatan sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Selain IPM faktor yang mempengaruhi kemiskinan yang diteliti dalam penelitian ini adalah PDRB. PDRB suatu wilayah yang tinggi menandakan wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik. Sebaliknya, PDRB suatu wilayah yang rendah menandakan perekonomian wilayah tersebut tidaklah dalam keadaan baik. Perekonomian yang dimaksud yaitu perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadi kemiskinan. PDRB suatu wilayah tinggi apabila wilayah tersebut dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai. Fenomena dalam penelitian ini adanya peningkatan yang terjadi di PDRB, IPM dan Tingkat kemiskinan yaitu pada tahun 2023 saat PDRB dan IPM meningkat tetapi bukan menurunkan kemiskinan melainkan meningkatkan kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu salah satunya pertumbuhan ekonomi yang tidak merata contoh nya di Desa yang mengandalkan pertanian yang rentan gagal panen, pendapatannya kecil atau fluktuatif, disektor pertambangan & industri besar yang mendorong PDRB naik tetapi mengakibatkan Tingkat kemiskinan naik juga dikarenakan minimnya penyerapan tenaga kerja lokal. Pada Tahun 2024 PDRB meningkat, IPM meningkat serta Tingkat Kemiskinan menurun hal ini adalah awal yang baik karena besarnya PDRB, IPM dapat menurunkan Tingkat kemiskinan di Tahun tersebut, PDRB tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 663.961,70 dan Tingkat Kemiskinan 984,24 ribu jiwa.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Produk**

Domestik Regional Bruto Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di provinsi Sumatera Selatan baik secara persial maupun simultan?

1.3. Tujuan Peneitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di provinsi Sumatera Selatan baik secara persial maupun simultan?

1.4. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah manfaat yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang kajian kemiskinan, masalah kemiskinan sampai sekarang masih belum sepenuhnya teratasi khususnya diprovinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu bagian dari ekonomi islam.

1.4.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk mengambil kebijakan dan keputusan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

b) Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan agar mendapat gelar sarjana ekonomi.

c) Bagi Akademis

- 1) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai akademik dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.
- 2) Sebagai salah satu sumber informasi tentang perkembangan tingkat kemiskinan provinsi di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera Selatan